

PENGUATAN KAPASITAS KELOMPOK TANI HARAPAN RAKYAT DI WILAYAH KPH LAIWOI TENGGARA SULAWESI TENGGARA

STRENGTHENING THE CAPACITY OF THE HARAPAN RAKYAT FOREST FARMER GROUP IN KPH LAIWOI TENGGARA AREA SOUTHEAST SULAWESI

Arniawati¹, Nur Arafah¹, Sahindomi Bana¹, Abdul Sakti¹, La De Ahmaliun^{1*}, Sarwinda Intan Putri¹, Zulkarnain¹, Muhsimin²

¹) Jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan, Universitas Halu Oleo

²) Jurusan Ilmu Lingkungan, Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan, Universitas Halu Oleo

*Email korespondensi: lade.ahmaliun@uho.ac.id

Abstract

Social forestry is one of the strategies for empowering communities around forests that aims to reduce deforestation and poverty by fostering community internalization in state forest management. The increasing number of permits poses a challenge for the government in assessing the institutional readiness of farmer groups after the permit. This fact serves as the background for the need to carry out community service by KTH Harapan Rakyat in Kongga Mea Village, focusing on institutional strengthening. The purpose of this service activity is to encourage greater knowledge and understanding of the roles of institutions and group governance, as well as their relation to forest conservation and economic improvement opportunities through the use of HKm areas. The service method uses a participatory approach through the delivery of materials, interactive discussions, questions and answers sessions, and reflection, involving 12 participants representing groups (administrators and members), forestry extension workers, and the village government. From the activities carried out, the participants showed an increase in the knowledge and understanding of the importance of a clear organizational structure, a transparent division of management duties, and the need to formulate a productive business development plan, both in the short and long term. Increasing participants' understanding of responsible and fair collective activities. This service activity is an important means of strengthening KTH's institutional capacity. Follow-up technical assistance is recommended to strengthen the farmer groups' capacity for sustainable forest management.

Keywords: Capacity Building, Institutional, KTH Harapan Rakyat, Social Forestry, Sustainability.

Abstrak

Perhutanan sosial merupakan salah satu strategi pemberdayaan masyarakat sekitar hutan yang bertujuan untuk mereduksi deforestasi dan kemiskinan melalui internalisasi masyarakat dalam pengelolaan hutan negara. Meningkatnya jumlah izin menjadi tantangan pemerintah terhadap kesiapan kelembagaan kelompok tani pasca izin. Fakta ini yang melatarbelakangi perlunya dilakukan pengabdian masyarakat KTH HKm Harapan Rakyat di Desa Kongga Mea yang berfokus pada penguatan kelembagaan. Adapun tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah mendorong peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang peran kelembagaan, tata kelola kelompok, serta kaitannya dengan kelestarian hutan dan peluang peningkatan ekonomi melalui pemanfaatan areal HKm. Metode pengabdian menggunakan pendekatan partisipatif melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, tanya jawab, dan refleksi, dengan melibatkan 12 peserta perwakilan kelompok (pengurus dan anggota), penyuluh kehutanan, dan pemerintah desa. Kegiatan ini merupakan Dari hasil kegiatan yang dilakukan, para peserta menunjukkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang kekuatan struktur organisasi yang jelas, pembagian tugas pengurus yang transparan, dan perlunya perumusan rencana pengembangan usaha produktif baik jangka panjang maupun jangka pendek. Peningkatan pemahaman peserta terkait kegiatan kolektif yang bertanggung jawab dan adil. Kegiatan pengabdian ini merupakan bentuk penguatan yang penting sebagai landasan bagi kapasitas kelembagaan KTH. Kegiatan tindak lanjut berupa pendampingan teknis direkomendasikan untuk memperkuat kelompok tani dalam pengelolaan hutan berkelanjutan.

Kata kunci: Perhutanan Sosial, Peningkatan Kapasitas, Kelembagaan, Keberlanjutan, KTH Harapan Rakyat.



CC Attribution-ShareAlike 4.0

Copyright © 2025 Author

Diterima: 17 November 2025; Disetujui: 17 Desember 2025; Terbit: 20 Desember 2025

PENDAHULUAN

Kelembagaan petani hutan menjadi kekuatan sebuah komunitas masyarakat untuk berkembang dan mendukung kemandirian. Keberadaan kelembagaan petani memiliki peran dalam mengkonsolidasikan modal sosial, memfasilitasi ketahanan mata pencaharian dan akses pasar, memungkinkan tata kelola hak dan sumber daya hutan, serta menyediakan platform untuk dukungan multi-sektoral yang bersama-sama mendorong kemandirian rumah tangga dan masyarakat (Friedman et al. 2020; Herdananta et al. 2024). Efektivitas lembaga sangat tergantung pada kualitas tata kelola internal, kesetaraan dan inklusi, keamanan tenurial ditambah dengan dukungan pasca-masa jabatan, dan lingkungan kebijakan dan pasar (Ramadhan & Waskitho, 2022).

Namun demikian, petani dan kelembagaan petani perhutanan sosial pasca izin belum sepenuhnya memenuhi harapan yang diharapkan. Studi empiris dan evaluatif menunjukkan bahwa petani dan lembaga kehutanan pasca-izin sering kali belum mencapai hasil kesejahteraan, ekologis, dan kelembagaan yang diinginkan program (Iriyani et al. 2020; Rahayu et al. 2024). Studi empiris pada beberapa wilayah memotret keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kelemahan kelembagaan yang terus-menerus, masalah guncangan sosial-ekonomi, dan kelangsungan bisnis di antara Kelompok Tani Hutan (KTH) yang menghambat hasil yang diinginkan (Pasaribu et al. 2025; Rahayu, 2024).

Jumlah izin perhutanan sosial di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahun yang sejalan dengan peningkatan jumlah lembaga pengelola. Data kementerian kehutanan mencatat sampai tahun 2024 sudah diterbitkan SK Persetujuan Perhutanan Sosial sebanyak 11.015 Unit seluas 7.968.700,66 hektar dan bermanfaat bagi \pm 1.361.581 Kepala Keluarga yang tersebar di 37 Provinsi (KLHK 2025). Keberadaan izin-izin menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Namun demikian, terbitnya izin menjadi tantangan yang harus dihadapi untuk menghasilkan kemandirian pada kelompok yang sudah mendapat izin.

Kelompok tani Harapan Rakyat yang berlokasi di Desa Kongga Mea Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, merupakan salah satu

penerima izin Hutan Kemasyarakatan (HKm). Areal kelola HKm memiliki luas 193 ha yang berada pada hutan produksi di wilayah KPH Laiwoi Tenggara. Izin HKm didasarkan pada SK No. 11552 tahun 2024. Sebagian besar areal merupakan hutan pinus yang sebelumnya telah dikelola masyarakat secara turun temurun. Lokasi areal HKm menjadi strategis sekaligus rentan terhadap perubahan yang dapat berdampak pada keberlanjutan kawasan hutan.

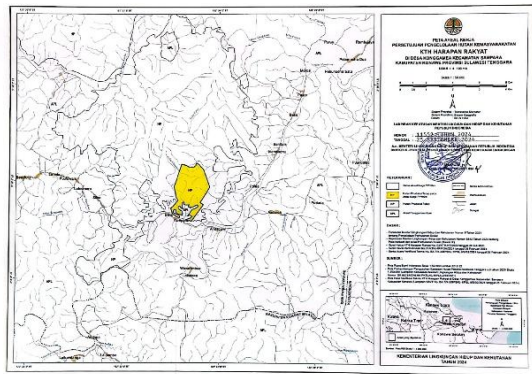
Sebagai sebuah lembaga yang baru, penguatan kapasitas kelembagaan menjadi penting untuk mendorong upaya kelompok dalam pengembangan lembaga dan ekonomi masyarakat. Berdasarkan hasil observasi di lapangan menunjukkan terdapat beberapa tantangan yang dihadapi kelompok tani kehutanan masyarakat adalah manajemen yang belum optimal yang disebabkan belum adanya sumber daya manusia yang terlatih dan infrastruktur yang tidak memadai. kapasitas manusia dan infrastruktur yang tidak memadai membatasi pencapaian tujuan yang dimaksudkan (Djumari et al. 2025; Hajjar et al. 2021). Faktor kontekstual sosial, kelembagaan, dan biofisik menentukan hasil, dengan kapasitas kelembagaan dipilih sebagai penentu kritis keberhasilan (Hajjar et al. 2021) selain itu, terbitnya izin perlu ditindaklanjuti dengan pengembangan kapasitas untuk menghasilkan keterlibatan masyarakat dan pengelolaan berkelanjutan yang diharapkan (Ragandhi et al. 2021).

Pengembangan kapasitas kelembagaan dan penguatan organisasi merujuk pada pengembangan sumber daya manusia termasuk proses dan struktur organisasi (Aminah et al. 2018). Dimensi-dimensi ini saling berkaitan dan menjadi landasan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, responsivitas, serta keberlanjutan kinerja lembaga/organisasi (Mulajaya & Christiani 2024). Pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan organisasi merupakan dua dimensi utama dari teori Grindle yang berperan penting dalam meningkatkan efektivitas organisasi kelompok tani (Salaka & Fentie 2020; Wulandari & Christine, 2022).

Untuk mendukung peningkatan efektivitas kelompok tani Harapan Rakyat, perlu dilakukan edukasi peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM. Melalui edukasi ini diharapkan dapat menjadi motivasi kelompok untuk melakukan perbaikan dalam tata kelola lembaga.

METODE

Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada Kelompok Tani Harapan Rakyat yang berlokasi di Desa Kongga Mea, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara. Kelompok ini terbentuk pada tahun 2023 yang disahkan oleh kepala desa Kongga Mea. Pada tahun yang sama mengusulkan izin HKm (Gambar 1) dan pada tahun 2024 menerima SK izin kelola HKm No. 11552 tahun 2024 dari kementerian Kehutanan RI.



Gambar 1. Lokasi Izin HKm Kelompok Tani Harapan Rakyat

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, beberapa tahapan yang dilakukan di antaranya:

1. Melakukan observasi dan pemetaan informasi terkait kelompok tani dan atributnya termasuk sumber Daya manusia baik itu kuantitas maupun kualitasnya.
2. Melakukan koordinasi dengan kelompok tani terkait rencana kegiatan, waktu pelaksanaan, dan metode kegiatan.
3. Melakukan edukasi peningkatan kapasitas kelembagaan dalam bentuk pemaparan materi dan diskusi interaktif dengan pengurus dan anggota kelompok tani.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program perhutanan sosial (PS) merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan kehutanan terutama mengatasi kemiskinan dan deforestasi. Program PS juga merupakan salah satu upaya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan negara. Terdapat lima skema PS di antaranya Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemitraan, dan Hutan Adat. Skema HKm

merupakan skema yang pertama kali digagas pemerintah dan saat ini sudah memasuki generasi ketiga (Fisher et al., 2019).

Sebagai dukungan dalam pencapaian perhutanan sosial, tim dosen kehutanan melakukan pengabdian kepada kelompok tani Harapan Rakyat dengan tema Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan dalam Praktik agroforestri untuk Pelestarian hutan dan Peningkatan Ekonomi Lokal. Dalam kegiatan ini melibatkan pengurus kelompok tani dan perwakilan anggota kelompok dengan jumlah peserta 12 orang. Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan pemerintah desa dan penyuluh kehutanan yang sekaligus merupakan pendamping kelompok tani Harapan Rakyat. Kegiatan ini merupakan media untuk merefleksikan kembali fungsi kelembagaan, pembagian peran, serta arah pengembangan usaha kelompok.

Pendekatan ini menjadi bagian penting dan selaras dengan konsep Grindle terkait pengembangan kapasitas dengan tiga dimensi utama yaitu pengembangan sumber daya manusia, penguatan organisasi, dan reformasi kelembagaan. Ketiga dimensi tersebut harus berjalan beriringan untuk membentuk ketahanan kelompok dalam menghadapi tantangan dan perubahan (Mulajaya & Christiani 2024)

Kegiatan pengabdian diawali dengan pemberian materi (Gambar 2) terkait peran kelembagaan terhadap anggota dan pengembangan jejaring untuk mendukung kemandirian kelompok tani. Pemaparan materi bertujuan untuk memberi wawasan kepada kelompok tani terutama pengurus kelompok sehingga dapat mengoptimalkan dan memperkuat sumber Daya yang dimiliki. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan optimalisasi pengelolaan hutan yang dapat berimplikasi positif terhadap keberlanjutan ekologi hutan dan ekonomi masyarakat.



Gambar 2. Pemaparan materi dari narasumber

Kegiatan yang berlangsung selama 4 jam ini memberikan kesempatan kepada peserta untuk terlibat dalam diskusi melalui sesi tanya jawab. Antusiasme peserta ditunjukkan melalui beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada para pembicara. Selain menjawab pertanyaan, peserta juga berbagi pengalaman dan pengetahuan, serta isu-isu praktis yang dihadapi dalam pengelolaan hutan. Kegiatan ini memberikan banyak manfaat kepada peserta, termasuk memahami potensi sumber daya dan bagaimana mengelolanya untuk memberikan manfaat ekologis dan ekonomi yang berkelanjutan.

Berdasarkan diskusi tersebut, berbagai rencana tindak lanjut diusulkan untuk mengembangkan usaha produktif dengan melibatkan tim dosen kehutanan berpengalaman yang berada di bidangnya. Mengacu pada beberapa penelitian, peningkatan kapasitas perlu dilakukan secara serentak dan berkesinambungan untuk mendukung kemandirian kelompok dalam kegiatan (Wulandari & Christine, 2022). Dalam kegiatan ini juga dilakukan penyerahan sejumlah bibit tanaman kehutanan dan MPTs kepada kelompok tani (Gambar 3).



Gambar 3. Penyerahan bibit secara simbolis

Pemberian bibit kepada kelompok tani sebagai langkah awal kegiatan kerja sama pendampingan dan bagian dari tri dharma perguruan tinggi. Pemberian bibit berfungsi sebagai bentuk dukungan awal untuk mendorong pemanfaatan lahan HKm melalui praktik agroforestri. Bibit yang diberikan bukan hanya dilihat sebagai bantuan fisik, tetapi sebagai simbol dimulainya kerja sama jangka panjang antara perguruan tinggi dan kelompok tani. Melalui pengelolaan bibit tersebut, kelompok diharapkan dapat mulai merancang kombinasi tanaman kayu dan tanaman multipurpose yang berpotensi memberikan manfaat ekonomi (misalnya buah, hasil hutan bukan kayu) sekaligus menjaga tutupan vegetasi hutan.

Dari hasil kegiatan ini, beberapa capaian awal dapat diidentifikasi. Pertama, dari sisi pengetahuan dan sikap, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai pentingnya tata kelola kelembagaan yang efektif dalam pengelolaan hutan. Sebelum kegiatan, sebagian besar anggota memaknai izin HKm hanya sebagai "izin mengelola lahan". Setelah kegiatan, mereka mulai melihat bahwa izin tersebut menuntut adanya pengelolaan kelembagaan yang transparan, inklusif, dan akuntabel untuk menghindari konflik internal dan memaksimalkan manfaat bagi seluruh anggota. Keberadaan kelembagaan harus diikuti dengan tata kelola yang baik, dukungan eksternal, dan akses ke modal dan pasar (Ramadhan & Waskitho, 2022)

Kedua, dari sisi kelembagaan, kegiatan ini memicu kesadaran pengurus untuk menata kembali struktur organisasi, pembagian tugas, dan mekanisme pertemuan rutin. Diskusi mengenai peran ketua, sekretaris, bendahara, serta seksi-seksi yang relevan (misalnya seksi usaha dan seksi konservasi) membantu kelompok merumuskan kembali fungsi kelembagaan secara lebih jelas. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa penguatan kapasitas lembaga tidak hanya terkait penambahan keterampilan individu, tetapi juga perbaikan proses dan struktur organisasi yang mendukung kerja kolektif (Baynes et al. 2015).

Ketiga, dari sisi pengembangan usaha, pembahasan mengenai potensi sumber daya yang dimiliki (areal kelola, aksesibilitas lokasi, dan dukungan kelembagaan desa/KPH) membuka wawasan kelompok untuk mengembangkan rencana usaha produktif jangka menengah. Meskipun belum tersusun secara lengkap dalam bentuk rencana bisnis, diskusi awal mengenai komoditas potensial, kemungkinan pola agroforestri, serta peluang kemitraan dengan pihak lain menjadi modal sosial penting bagi tahap tindak lanjut berikutnya.

Keempat, dari sisi motivasi, peserta menyampaikan harapan agar kegiatan seperti ini bisa berlanjut dengan tema-tema lain yang lebih teknis, misalnya penyusunan rencana kerja HKm, pengembangan usaha berbasis hasil hutan bukan kayu, atau strategi pemasaran. Harapan tersebut menunjukkan bahwa edukasi kelembagaan yang dilakukan berhasil menumbuhkan rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap kelompok dan meneguhkan komitmen untuk menjaga keberlanjutan kelembagaan.

Secara keseluruhan, kegiatan edukasi kelembagaan ini memberikan kontribusi awal dalam memperkuat kapasitas Kelompok Tani Hutan Harapan Rakyat sebagai pengelola izin HKm yang baru. Penguatan pengetahuan, kesadaran kelembagaan, dan munculnya rencana tindak lanjut menjadi fondasi penting bagi pengembangan kelompok di masa mendatang. Jika diikuti dengan pendampingan lanjutan dan integrasi dengan program-program teknis agroforestri, maka penguatan kelembagaan ini berpotensi mendorong tercapainya tujuan ganda perhutanan sosial, yaitu pelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.



Gambar 4. Kegiatan Pengabdian pada kelompok tani Harapan Rakyat

Para peserta kegiatan mengharapkan kegiatan ini akan berlanjut dengan tema yang lain dan memberi motivasi pada keberlanjutan kelembagaan kelompok tani.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian berupa edukasi kelembagaan di Kelompok Tani Hutan HKm Harapan Rakyat telah memberikan penguatan awal yang penting bagi kemampuan kelompok dalam mengelola izin perhutanan sosial. Melalui teori dan diskusi praktis, pengurus dan anggota menjadi lebih sadar akan definisi lembaga, peran struktur organisasi, dan hubungan antara izin HKm, peningkatan ekonomi keluarga, dan kelestarian hutan. Hasil nyata tersebut antara lain peningkatan kesadaran akan perlunya menata ulang organisasi, memperjelas tugas manajemen, dan mulai merumuskan rencana pengembangan bisnis yang produktif berdasarkan potensi sumber Daya yang dimiliki.

Penyerahan bibit tanaman kehutanan dan MPTS mendorong kelompok untuk memulai praktik agroforestri, yang diharapkan dapat menjaga tutupan hutan sekaligus meningkatkan pendapatan. Beberapa rencana tindak lanjut yang disepakati menunjukkan bahwa proses pembelajaran tidak berhenti pada konseling satu arah, tetapi mendorong inisiatif dari dalam kelompok. Keuntungan dari kegiatan ini antara lain target yang tepat (kelompok baru penerima izin HKm), penggunaan metode partisipatif yang memberikan ruang dialog, dan keterlibatan pemerintah desa dan penyuluh yang memperkuat jaringan kelembagaan.

Namun, ada kekurangan, antara lain waktu kegiatan yang singkat. Ke depannya,

kegiatan harus dilanjutkan sebagai pendampingan berkala tentang topik yang lebih teknis (rencana kerja, bisnis, dan pemasaran), melibatkan lebih banyak anggota, dan terintegrasi dengan pelatihan agroforestri dan penguatan akses pasar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Universitas Halu Oleo yang telah mendanai kegiatan pengabdian, Kelompok tani Harapan Rakyat, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah., Shobichatul., Prasetyo, I. 2018. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Organisasi Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat." *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat* 5(1): 61–73.
- Baynes, Jack et al. 2015. "Key Factors Which Influence the Success of Community Forestry in Developing Countries." *Global Environmental Change* 35: 226–38.
- Djumari., Sholahuddin, A., Wahyudi, C. 2025. "Implementation of Social Forestry Management in Forest Areas with Special Management." *International Journal of Research in Social Science and Humanities* 06(05): 147–57.
- Fisher, Micah R., Dhiaulhaq, A., Sahide, M.A.K. 2019. "The Politics, Economies, and Ecologies of Indonesia's Third Generation of Social Forestry: An Introduction to the Special Section." *Forest and Society* 3(1): 152–70.
- Friedman, Rachel S. et al. 2020. "Beyond the Community in Participatory Forest Management: A Governance Network Perspective." *Land Use Policy* 97(January 2019): 104738. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104738>.
- Hajjar, Reem. 2021. "A Global Analysis of the Social and Environmental Outcomes of Community Forests." *Nature Sustainability* 4(3): 216–24. <http://dx.doi.org/10.1038/s41893-020-00633-y>.
- Herdananta, Bisma Yoga et al. 2024. "Assessing Social Capital in Community Forest Management in Kalibawang Sub-District, Wonosobo District, Central Java, Indonesia." *Asian Journal of Ethnobiology* 7(1): 50–60.
- Iriyani, Silfi, A. Humam Hamid, Agus Setyarso, and Hairul Basri. 2020. "Towards the Implementation of Social Forestry Policy in Aceh Province, Indonesia: Process and Institutional Assessment." *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities* 28(4): 2689–2710.
- KLHK. 2025. *Laporan Kinerja Tahun 2024 Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan*. Jakarta, Indonesia.
- Mulajaya, R. P. Christiani, C. 2024. "Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Desa Tangguh Bencana (Destana) Di Kabupaten Magelang." *Jurnal Ilmiah Global Education* 5(1): 693–701.
- Pasaribu., Maulina, L., Dewi, N.L.P.K. 2025. "Pengaruh Tata Kelola Kelembagaan Dan Usaha Terhadap Efektivitas Pengelolaan Hutan Melalui Kinerja KTH Di Perhutanan Sosial Glagalinggah, Kintamani, Bali." *Journal Science Innovation and Technology (SINTECH)* 5(2): 63–72.
- Ragandhi, Arsad, Agus Heruanto Hadna, Setiadi Setiadi, and Ahmad Maryudi. 2021. "Why Do Greater Forest Tenure Rights Not Enthuse Local Communities? An Early Observation on the New Community Forestry Scheme in State Forests in Indonesia." *Forest and Society* 5(1): 159–66.
- Rahayu, S. 2024. "A Multiple Streams Analysis: The Policy Process Indonesia's New Social Forestry Model." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 1430(1).

- Ramadhan, R, D F Syah, and N T Waskitho. 2022. "Effectiveness and Institutional Conditions in Social Forestry Program: Case Study of Forest Village Community Institution (LMDH) Sumber Makmur, Forest Management Unit (KPH) Malang." *Jurnal Sylva Lestari* 10(1): 141–54.
- Salaka., Fentie J. 2020. "Efektivitas Kelembagaan Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat Di Tingkat Lokal." *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 17(1): 75–92.
- Wulandari, Christine. 2022. "Training for Strengthening the Human Resources Capacity Overcoming the Socio-Economic Impact on Social Forestry Farmers Due to the Covid-19 Pandemic at Pesawaran FMU, Lampung." *Repong Damar: Jurnal Pengabdian Kehutanan dan Lingkungan* 1(2): 136.